

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI  
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP  
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL  
(Survei pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se eks  
Karesidenan Surakarta)**



**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

**WAHYU PURWANTI**

**B 200060089**

**FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manajemen pemerintahan daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah efektif di berlakukan per Januari tahun 2001 (Undang-undang ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004). Diberlakukannya Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentunya dapat terwujud apabila ada upaya serius (Pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, Pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan

yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sector yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (2005). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain yaitu pendapatan perkapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini. Indikator ini lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada kemampuan daerah/negara untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB) agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju pertumbuhan penduduk.

Dari uraian diatas maka judul yang penulis pilih adalah “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah penelitian diatas, akan timbul beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Adapun periode data yang dibutuhkan yaitu 5 tahun (2005-2009) dari 7 Kabupaten yaitu Surakarta, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Boyolali dan Sukoharjo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk penyusunan skripsi dan menambah khasanah pengetahuan serta membandingkan antara teori dengan praktek yang nyata.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk saran-saran bagi evaluasi atas apa yang telah berjalan selama ini.

3. Bagi Dunia Akademik

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bahan kajian dalam melakukan penelitian mengenai Akuntansi sektor publik terutama yang terkait dengan judul penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan dari penelitian ini dibagi kedalam lima BAB yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain : pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode penelitian, sampel dan data penelitian, definisi operasi variabel, serta teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengujian parsial, pengujian secara simultan serta pengujian ketepatan perkiraan model.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari apa yang telah diuraikan ada pada bab-bab sebelumnya.